

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi implementasi skema KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indeks kepentingan relatif menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT memiliki tingkat kesiapan yang tinggi (“cukup siap” sampai dengan “sangat siap”) untuk implementasi skema KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT terutama dalam aspek komitmen dan koordinasi kelembagaan.
- b. Beberapa kendala implementasi skema KPS di Provinsi NTT antara lain kemampuan keuangan pemerintah daerah terbatas, kemampuan masyarakat untuk membayar tarif kurang mendukung, pendapatan perkapita rendah, belum ada kesesuaian kebijakan terhadap tujuan KPS, kondisi makro ekonomi kurang mendukung, koordinasi dengan pemerintah daerah lain (luar provinsi) masih minim, dan sulitnya perubahan paradigma penggunaan skema pembiayaan melalui APBD ke skema pembiayaan melalui KPS.
- c. Jenis-jenis infrastruktur yang berpotensi yang tergolong dalam lima usulan prioritas utama dan siap dikerjasamakan melalui skema KPS adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, dan infrastruktur air minum.

- d. Model-model skema KPS yang dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT antara lain untuk model kerja sama terdiri dari model BT (*Build and Transfer*), BOT (*Build, Operate, Transfer*), BTO (*Build, Transfer, and Operate*), dan model ROT (*Renovate, Operate, and Transfer*). Sementara itu, untuk model pengembalian modal terdiri dari model AP (*Availability Payment*), model tarif (*users pay*), dan kombinasi antara keduanya.

## 5.2. Saran

- a. Penelitian tentang potensi implementasi KPS dalam tulisan ini dilakukan dari perspektif responden yang berasal dari sektor publik. Alasannya sudah disampaikan pada Bab I bagian Ruang Lingkup Penelitian. Di sisi lain, ada risiko bias persepsi dan hal ini dipandang sebagai keterbatasan penelitian ini. Untuk mengetahui apakah risiko ini terjadi perlu adanya penelitian lanjutan dengan cakupan responden yang mewakili kepentingan yang berbeda, khususnya dari badan usaha swasta.
- b. Model penelitian yang sama dapat dilakukan ke depannya untuk daerah-daerah lain di Indonesia karena sejauh ini implementasi skema KPS di daerah untuk penyediaan infrastruktur masih sangat terbatas.
- c. Agar penerapan skema KPS dapat berjalan dengan baik di NTT, Pemerintah Provinsi NTT perlu ditingkatkan kesiapannya pada aspek kompetensi SDM dan kompetensi fiskal yang cenderung masih menjadi kendala. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kendala-kendala yang ada untuk dapat menarik minat badan usaha swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfreyno, A. E., 2017, Kerja Sama Pemerintah-Swasta dalam Pelayanan Air Minum di DKI Jakarta (Tahun 2008-2012), tersedia di <http://journal.unas.ac.id> (diakses tanggal 25 Agustus 2017).
- Asikin, Z., 2012, Perjanjian *Build and Transfer* antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur (Studi di Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, 507-522.
- Asikin, Z., 2013, Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik, *MIMBAR HUKUM*, Volume 25, Nomor 1, 55-67.
- Berita Satu 2 April 2018, Indonesia Akan Miliki Pembangkit Listrik Arus Laut Terbesar di Dunia, tersedia di [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) (diakses 03 Agustus 2018).
- BPS, 2018, Statistik Indonesia 2018, Jakarta.
- BPS, 2018, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018, Berita Resmi Statistik, Nomor 57/07/Th. XXI, 16 Juli 2018.
- BPS, 2018, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2018, Berita Resmi Statistik, Nomor 65/08/Th.XXI, 6 Agustus 2018.
- BPS NTT, 2018, Pertumbuhan Eko <sup>115</sup> TT Triwulan II-2018, Berita Resmi Statistik, Nomor 06/08/5300/Th.XXI, 6 Agustus 2018.
- Budiaji, W., 2013, Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert, *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, Volume 2, Nomor 2, 127-133.
- Bulkin, I., 2005, Investasi Swasta dan Infrastruktur, tersedia di <https://www.bappenas.go.id> (diakses tanggal 6 Desember 2017).
- Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 2017, Buku Data Base Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, Kupang.
- Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTT, 2018, Pembiayaan Penanganan Infrastruktur 2019 – 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 29 Juni 2018, Kupang.
- Dinas PU Provinsi NTT, 2015, Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang
- Direktorat Jenderal Ciptakarya, 2018, Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Bidang Cipta Karya, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Keciptakarya 6 Juni 2018, Kupang.

- Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, BAPPENAS, 2010, *Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur*, tersedia di [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) (diakses tanggal 13 Oktober 2017).
- Floresa 16 Juni 2017, *Pembangunan Pembangkit Listrik Arus Selat Gonsalu Diapresiasi*, tersedia di [www.floresa.co](http://www.floresa.co) (diakses 03 Agustus 2018)
- FloresPos 6 April 2018, *Victory-Joss Pastikan Infrastruktur Jalan di NTT Selesai dalam Tiga Tahun*, tersedia di <http://www.florespost.co> (diakses 11 September 2018).
- Grigg, 1988, *Pengertian Infrastruktur Menurut Grigg*, tersedia di <https://informasiana.com> (diakses tanggal 6 Desember 2017).
- Hardjomuljadi, S., 2009, *Strategi Pra Kontrak untuk Mengurangi Dampak Klaim Konstruksi pada Proyek Pusat Listrik Tenaga Air di Indonesia*, Disertasi Universitas Tahumanegara, Jakarta.
- Hilton, P. R. and Brownlow, C., 2004, *SPSS Explained, (East Sussex: Routledge)* p.364.
- Ismowati, M., 2016, *Kajian Urgensi Public Private Partnerships di Kota Bandung*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume VIII, Nomor 02, 143-151.
- Joesoef, I. E., 2011, *Model Kerja Sama Pemerintah Swasta: Studi Penerapan Kontrak Build Operate Transfer Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Juliandi, A., 2008, *Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian dengan Cronbach Alpha: Manual*, tersedia di <http://www.azuarjuliandi.com> (diakses tanggal 2 Mei 2018).
- Khitam, M. C., 2012, *Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata*, *Jurnal EKBIS*, Volume IV, Nomor 1, 333-349.
- Kurniawan, E. S., Pudjianto, B., dan Wicaksono, Y. I., (2009), *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)*, *TEKNIK – Volume 30*, Nomor 3, 147-155.
- Lodico, M. G., Spaulding D. T., Voegtle, K. H., 2006, *Methods in Educational Research: From Theory to Practice* (San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.,) p.211.
- Masitoh, H., 2014, *Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam*

Pembangunan dan Pengembangan Darmo Trade Centre (DTC) Surabaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, 1-9.

Ozohu-Suleiman, A., and Oladimeji L. A., 2015, *Public-Private Partnership and Infrastructural Development in Nigeria: The Rail Transportation Sector in Focus*, British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 254-266.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017, Kupang.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, Kupang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016, Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011 Tahun 2010, Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08 Tahun 2015, Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015, Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta.

Petersen, H., 2011, *Public-Private Partnerships as Converging or Diverging Trends in Public Management? A Comparative Analysis of PPP Policy and Regulation in Denmark and Ireland*, International Public Management Review, Vol. 12, Iss. 2, 1-37.

PMI, 2004, *A Guide to The Project Management of Body Knowledge (PMBOK Guide)*, USA.

PMI, 2008, *A Guide to The Project Management of Body Knowledge (PMBOK Guide)*, USA.

- Pribadi, K. S., Wirahadikusuma R. D., Pangeran, M. H., dan Darmanto A., 2009, Model Pemilihan Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Investasi Air Minum Menggunakan Proses Jaringan Analitis (ANP), *Dinamika TEKNIK SIPIL*, Volume 11, Nomor 3, 236-245.
- PT. Sarana Multi Infrastruktur, 2014, Panduan Penyelenggaraan KPS dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta.
- PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, 2014, Kerja Sama Pemerintah Swasta di Indonesia, Acuan Alokasi Risiko.
- Putri, E. S. dan Wisudanto, 2016, Struktur Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Penunjang Pertumbuhan Ekonomi, Simposium I Jaringan Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia, tersedia di <https://www.researchgate.net> (diakses tanggal 6 Desember 2017).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kementerian PUPR, 2011, Uji Model Kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengelolaan TPA Regional, Jakarta.
- Qizilbash, A., 2011, *Public-Private Partnerships and The Value of The Process: The Case of Sub-Saharan Africa*, *International Public Management Review*, Vol.12, Iss. 2, 38-54.
- Republika 25 Juli 2017, *Private Participation is Crucial in Building Infrastructure*, tersedia di <http://republika.co.id> (diakses tanggal 29 Juli 2017).
- Sabry, M. I., 2015, *Good Governance, Institutions and Performance of Public Private Partnerships*, *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 28 No. 7, pp.566-582.
- Sinar Harapan 23 Mei 2018, Berturut-turut Tiga Tahun NTT Dapat Opini WTP, tersedia di <http://sinarharapan.net> (diakses 10 Agustus 2018).
- Sipala, I., 2016, *Kajian Hambatan dan Tantangan Terhadap Realisasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Indonesia*, Tesis Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Susantono, B. dan Berawi, M. A., 2012, *Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerja Sama Pemerintah Swasta di Indonesia*, *Jurnal Transportasi*, Volume 12 Nomor 2, 93-102.

- Terasntt 25 Juni 2018, DPRD Flotim Minta Groundbreaking Palmera Sebelum Lebu Raya Tinggalkan Jabatan, tersedia <https://www.terasntt.com> (diakses 10 September 2018).
- Timor Expres 01 Desember 2016, KPK Tangani 79 Kasus Korupsi di NTT, tersedia di <http://timorexpress.fajar.co.id> (diakses 10 Agustus 2018).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Vives, A., Benavides, J., and Paris, M.A., 2006, *Financial Structuring of Infrastructure Projects in Public-Private Partnerships a Tool for Designing Feasible Structures*, IDB Publication, Washington, D.C.
- Wibowo, A., 2016, Perkembangan Terkini dalam Pembiayaan Infrastruktur yang Melibatkan Partisipasi Badan Usaha, Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil X, 26-27 Oktober 2016, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1-10.
- Wibowo, A., and Alfen, H. W., 2014, *Identifying Macro-Environmental Critical Success Factors and Key Areas for Improvement to Promote Public-Private Partnerships in Infrastructure: Indonesia's Perspective*, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 21 No. 4, pp. 383-402.

